

# **Hari Pertama Berkantor, Anggota DPRD Bombana dan Pendemo Teken Kesepakatan**

**Rumbia, SultraNET. | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang baru saja dilantik untuk Periode 2019-2024 nampaknya menjadi harapan besar masyarakat daerah itu untuk menyuarkan aspirasi terhadap berbagai persoalan yang ada.**

Hal itu nampak jelas bahkan sejak hari pelantikan anggota DPRD tanggal 01 Oktober 2019 kemarin, para wakil rakyat itu sudah didatangi ratusan massa yang melakukan aksi menuntut perbaikan berbagai ruas jalan yang ada di Kabupaten Bombana khususnya yang ada dipulau di Kabaena yang dinilai kerusakannya sudah sangat parah.

**Rupanya Aksi dari berbagai elemen masyarakat Bombana itu kembali hadir dihari Pertama ke 25 Anggota DPRD itu Masuk Kantor, Rabu (02/10/2019).**

Berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (AMP-LSM) itu meminta anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk segera fokus menyelesaikan permasalahan yang fatal dirasakan masyarakat Bombana saat ini.

Asri salah satu peserta aksi menyebut permasalahan mendasar yang dihadapi bombana saat ini, yang harus segera disuarakan Anggota DPRD Baru yaitu terkait infrastruktur berbagai ruas jalan di seluruh Kecamatan di Bombana yang tidak memadai, mengkaji efektifitas dan transparansi penerapan program gembira cerdas, gembira sehat dan beberapa program pemberdayaan maupun program lain yang digagas Pemkab Bombana, karena realisasi dari program tersebut dinilai sarat kepentingan dan dianggap tidak tepat sasaran.

*“ gembira cerdas yang seharusnya diperuntukkan untuk para mahasiswa yang belum sarjana, atau mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, ini aneh kalau ada sarjana yang menggunakan Gembira Cerdas,” ujarnya.*

Salah satu peserta aksi Rezki menambahkan bahwa pendidikan khususnya di Kabupaten Bombana tidak seindah yang dipaparkan di media, seharusnya Pemkab Bombana turun langsung melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa.

***“Kasihlah kami lihat SD yang ada di pulau masudu sana, siswanya kurang lebih 100 orang dan hanya punya dua guru saja, itupun PHTT dan mereka suami istri, miris,” ucap Rizky***

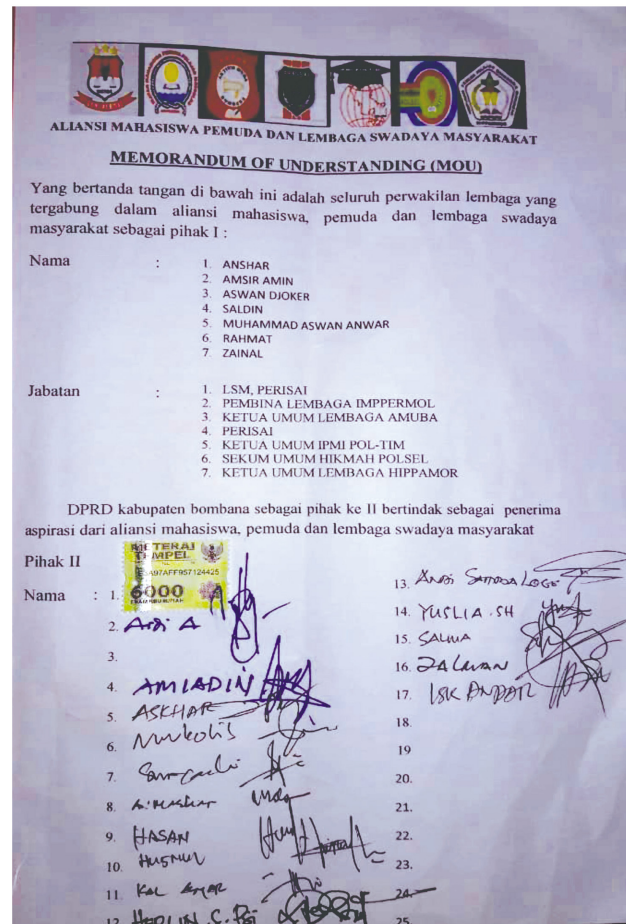
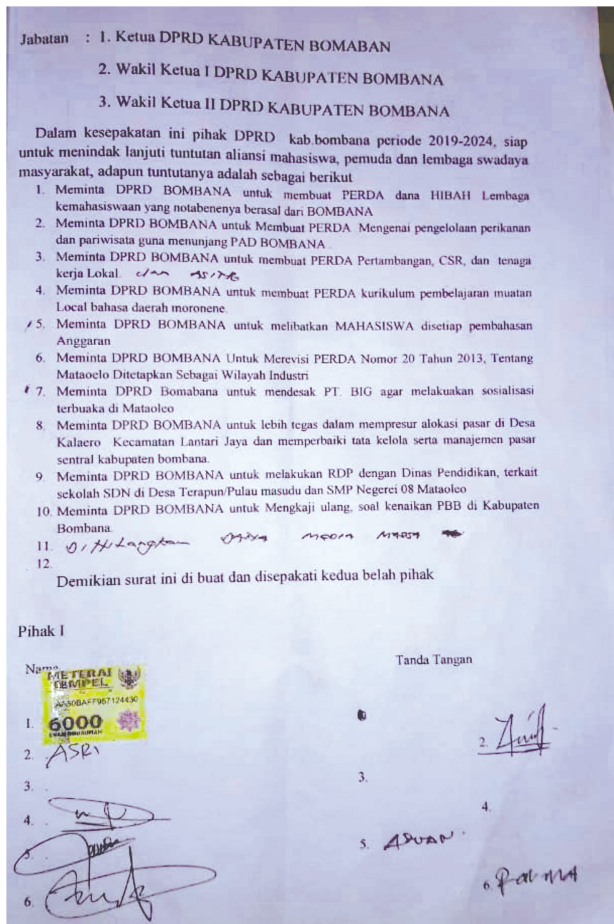
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD terpilih Arsyad mengakui, bahwa program Gembira Cerdas untuk mahasiswa, bukan untuk sarjana. Regulasinya jelas dalam Perbup dan standar nilai perestasi dengan nilai IP tiga koma nol.

***“Kalau memang betul-betul ada sarjana yang terima Gembira Cerdas, kirim ke saya namanya dan saya akan tindak lanjuti ke Pansel,” tegas Arsyad.***

Arsyad juga meminta, diberi ruang agar membentuk terlebih dahulu alat kelengkapan dewan dan membuat rencana kerja.

***“Beri kami dulu ruang untuk membentuk alat kelengkapan, andaikan masih banyak saran-sarannya adik-adik itu, kami akan lebih senang dan akan membuat rencana kerja,” ucap Arsyad.***

Sebelum membubarkan diri salah satu peserta aksi, Zainal yang juga Ketua Hippamor meminta agar massa dari AMP-LSM dan seluruh anggota legislatif di ruang rapat untuk komitmen menandatangani poin persetujuan tuntutan massa untuk ditindaklanjuti dan disetujui oleh semua peserta rapat yang langsung menandatangani poin yang diajukan tersebut.



MOU kesepakatan antara Peserta Aksi dan Anggota DPRD Baru

Pewartanya : Efendi

# Pelantikan Anggota DPRD Bombana Diwarnai Unjukrasa, Pendemo Suggestikan Teatrikal

**Rumbia, SultraNET.** | Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2019), diwarnai aksi unjuk rasa (unras) dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Kedatangan ratusan peserta aksi tersebut untuk menuntut Pemerintahan Kabupaten Bombana agar mengeluarkan kebijakan dan menyikapi beberapa isu penting yang sedang hangat ditengah-tengah masyarakat salah satunya mengenai keluhan terkait infrastuktur jalan yang tidak memadai dan jauh dari layak yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bombana serta beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten yang dinilai tidak pro rakyat.

Salah satu peserta aksi, Muh. Arham dalam orasinya meminta Pemkab Bombana lebih bijak dan serius menangani persoalan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat kabaena, mataoleo, poleang dan beberapa titik jalan di ibu Kota Bombana yang sampai saat ini belum sama sekali di sentuh pembangunan yang memadai.

***” Infrastur jalan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat hari ini, mengingat ada banyak jalan di bombana ini yang sangat mempriharinkan,” Sebutnya***

Senada dengan Arham, Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Moronene, Zainal mendesak keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam menyikapi beberapa permasalahan hari ini yang memang berdampak langsung kepada masyarakat karena menurutnya pembentukan Kabupaten Bombana Menjadi otonomi baru tujuannya tidak lain yakni kesejahteraan masyarakat.

***” sudah tujuh tahun Haji Tafdil memimpin, tapi infrastuktur jalan di Kabupaten ini masih sangat memprihatinkan terlebih Kabaena, Mataoleo, Lantawonua, Poleang dan beberapa ruas jalan ibu kota yang masih memprihatinkan,” Bebernya***

Asri, orator lain yang juga Putra Bombana asal Mataoleo menyayangkan sikap aparat kepolisian melakukan penjagaan yang sangat ketat, padahal menurutnya pergerakan yang dibangun merupakan aksi damai yang tidak akan berujung pada aksi anarkis.

***“Jika kami percaya kepolisian sudah seharusnya pihak kepolisian juga mempercayai kami untuk berada di kantor bupati, kami hanya ingin menyampaikan Aspirasi kami ,” Tutur pria yang akrab disapa acci itu.***

Asri juga menyayangkan sikap Pemkab yang lamban menemui massa yang hadir di gedung megah itu untuk menyampaikan aspirasinya

*” Kami hadir di tempat ini bukan untuk menggurui Pemerintah, kami hanya ingin mendengar penjelasan Pemda Bombana terkait beberapa masalah yang terjadi di Daerah ini,” Urainya*

Dengan kesabaran para demonstran, Akhirnya Wakil Bupati Bombana, Johan Salim hadir dan menemui massa aksi didampingi Arsyad selaku Ketua DPRD sementara dan Iskandar, Wakil Ketua DPRD sementara.

Kehadiran Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD sementara disambut dengan suguhan tarian teatrikal yang sangat menghibur namun sarat bermakna kritikan.

Menanggapi tuntutan masa aksi Wakil Bupati Bombana, Johan Salim mengapresiasi tuntutan massa aksi yang datang langsung di Kantor Bupati menyampaikan aspirasinya.

*” saya senang ada penyampaian begini agar kami juga merasa diawasi oleh adik adik, terkait apa tuntutannya saya akan sampaikan ke Bupati,” Tutur Johan Wakil Bupati Bombana*

Arsad, Ketua DPRD Bombana sementara yang juga hadir di tengah massa aksi mendukung penyampaian aspirasi bahkan ia meminta agar dirinya selalu di awas.

*” saya inginnya DPRD itu di awasi terus, namun untuk sementara kami belum bisa berbuat apa apa karna kami mau berkoordinasi dengan semua anggota dewan yang baru saja di lantik ini,” Tuturnya.*

**Pewartanya : Efendi**

---

# Hari Pelantikan DPRD Wakatobi Disambut Demonstrasi

**Wakataobi, SultraNET. | Hari pertama pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara periode 2019/2024 di sambut dengan demonstrasi beberapa aliansi masyarakat dan puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD, Selasa (1/10/2019).**

Masa aksi menggelar unjuk rasa di DPRD terkait beberapa isu yang sedang hangat bergulir ditengah-tengah masyarakat. Baik berupa revisi undang-undang KUHP maupun persoalan lokal yang ada di Wakatobi.

**Orator dari Aliansi Mahasiswa Wakatobi, Whii Matangkara mengatakan bahwa DPRD tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, undang-undang yang dilahirkan hanya menguntungkan kaum-kaum berdasi.**

*“Kami menilai dewan perwakilan rakyat pada hari ini baik dari tingkat pusat maupun daerah, tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia dari berbagai regulasi yang dihadirkan, untuk itu kami menyatakan mosi tidak percaya kepada anggota DPRD,” Teriak Ketua Umum HMI komisariat Hijau Hitam tersebut.*

Selain itu, Harjo yang juga menjadi orator menyayangkan penjagaan yang sangat ketat oleh kepolisian. Padahal menurutnya pergerakan yang dibangun merupakan aksi damai yang tidak akan berujung pada aksi anarkis.

*“Jika kami percaya kepolisian sudah seharusnya pihak kepolisian juga mempercayai kami untuk berada di depan pagar DPRD, kami hanya ingin menyampaikan kebenaran,” ujarnya.*

Dari lokasi yang sama dengan sound yang berbeda hadir dari Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton (BOM Kepton) untuk menuntut ganti rugi lahan yang dinilai belum dibayar.

*“Sangat disayangkan jika banyak masyarakat Wakatobi yang tidak*

*mendapatkan ganti rugi lahan dalam pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum,” ucap Roziq Arifin.*

Dalam aksi demonstran di depan DPRD ini dikawal ketat oleh kepolisian, dari pantauan harapansultra.com masa aksi hanya bisa menyampaikan orasinya di jarak 30 meter dari depan pagar DPRD. (adm)

**Laporan : Samidin**

---

# **Anggota DPRD Busel Resmi Dilantik, La Ode Armada Dipercaya Jadi Pimpinan Sementara**

**Batauga, SultraNET. | Sebanyak 20 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan untuk Periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, bertempat di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (01/10/2019) tepat Pukul 13.00 Wita.**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Nurunani S, Sos ketika dihubungi Media ini, mengungkapkan Bahwa Anggota DPRD yang dilantik adalah ini merupakan hasil Pemilu 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dengan Nomor : 455 Tahun 2019 Tanggal 23 September 2019.

*” Benar sebanyak 20 Orang anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk periode 2019-2024 diambil sumpahnya hari ini oleh ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo,” Ungkapnya.*

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara telah menetapkan Waode Ruhania, Karlina. S, SM, H. Laharnu, Dodi Hasri, S, Pd, La Ode Armada masing masing dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selanjutnya, La Ishaka, L.M, Amal, A, Md, Aliadi, S. Pd, La Saali, BA, masing-masing dari Partai Hati Nurani Rakyat.

**Kemudian Arlin, Muh. Alamin, SH, Pomili Womal, S, Pd, SD, masing masing dari Partai Demokrat, Lanuhi, La Hijira, SH dari Partai Golongan Karya, La Muhadi, S. Pd dan Lismayarti, SE dari Partai Keadilan Sejahtera, Laode Taufik Mansur dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Wa Kodu dari Partai Persatuan Pembangunan, HJ. Laopo dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Laode Ashadin dari Partai Nasional Demokrat.**

Seremoni Rapat Paripurna DPRD dibuka oleh Ketua DPRD domisioner, La Usman, yang memimpin jalanya Rapat Paripurna, lalu dilanjutkan dengan Pembacaan Surat keputusan Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan periode 2014-2019 dan Peresmian keanggotaan anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan periode 2019-2024.

**Selanjutnya Pengucapan sumpah dan janji 20 legislator itu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Subai, SH, MH yang berlangsung di Kemudian Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara dibacakan oleh Bupati Buton Selatan, H.Laode Arusani.**

Pantauan awak media ini, Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Buton Selatan dipercayakan kepada Laode Armada dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AM)

---

## **25 Anggota DPRD Bombana Resmi Dilantik**

**Rumbia, SultraNET.** | Sebanyak 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu dilantik secara

**resmi, bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (01/10/2019) .**

Ke 25 Anggota dewan yang dilantik tersebut yaitu untuk Dapil 1 Bombana yaitu Andi Wawan Idris (Gerindra), Salman (Nasdem), Abdul Rauf (PAN), Hasan Hanani (PPP) dan Herlin (PDIP).

**Untuk Dapil 2 Bombana yaitu, Ardi (PAN), Arsyad (Nasdem), Andi Samba Loge (Gerindra), Yuslia (PDIP) dan Nasruddin (PKB)**

Dapil 3 Bombana yaitu, Ashkar (PAN), Suryadi (Gerindra), Akmal (Golkar), Kal Ahsyar Yusuf (Nasdem), Andi Masyhar (Hanura) dan Salma (PKS)

**Dapil 4 Bombana yaitu, Khusnul Fuadi (Nasdem), Andi Firman (PAN), Rumianto (Demokrat) dan Nurkholis (PKB)**

Dan untuk Dapil 5 Bombana, Musrif (PAN), Ashari Usman (Nasdem), Iskandar (PKB), Amiadin (PPP), Ahmad Mujahid (Golkar).

(IS)

---

# **Ikuti Jejak Sang Ayah, Hasan Hanani Siap Langsung Bekerja Kawal Aspirasi Masyarakat Bombana**

**Rumbia, SultraNET.** | Hasan Hanani pria kelahiran 13 Desember 1994 hari ini, Selasa, (01/10/2019) resmi dilantik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bhakti tahun 2019-2024.

Di usia ke 24 Tahun, menjadikan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih dari Dapil 1 Bombana itu menjadi Anggota Legislatif termuda di

DPRD Bombana.

**Ditemui awak media ini sebelum prosesi pelantikan, Hasan Hanani mengaku bahwa di usia yang masih terbilang muda itu, tidak menjadi penghalang bagi Putera Alm. Hanani dan Samsiar itu untuk dapat langsung bekerja untuk masyarakat Bombana.**

Menurutnya kerja kerja politik dan masyarakat telah ia tekuni dan belajar dari sang ayah Alm. Hanani yang juga politisi Partai berlambang Ka'bah dan mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019, sehingga bukan hal baru lagi baginya untuk berinteraksi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

*“Di DPRD ini kita sepakat bahwa bukan tempat untuk kita belajar lagi, tetapi disini sudah tempat kita mengaktualisasikan ilmu dan pengalaman kita mengawal aspirasi masyarakat,” Imbuhnya*

Terlebih lagi lanjut Pria yang masih tercatat sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kendari itu, jalur politik yang ia tempuh saat ini merupakan Amanah dari Almarhum Ayahnya yang sebelum meninggal dunia mewasiatkan agar perjuangan almarhum dijalur Politik dilanjutkan oleh sang Anak.

*“Sebelum orang tua saya meninggal, beliau menitip pesan kepada Ketua PPP Bombana Pak Amiadin, agar di Pemilu 2019 saya selaku Anak yang beliau titip untuk maju. Jadi bagi saya ini amanah almarhum yang harus saya jalankan dengan sebaik baiknya,” Pungkasnya (IS)*

---

**APBD Sultra 2020 Resmi  
Ditetapkan, Anggaran Meningkatkan**

# dari TA 2019

**Kendari, SultraNET.** | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin (30/9/2019).

Penetapan anggaran tersebut setelah melalui proses pembahasan legislatif dan eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana untuk Tahun Anggaran 2020, APBD Prov. Sultra mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 4 Triliun Lebih.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi Mengatakan bahwa kita Patut Bersyukur, Karena Pembahasan APBD Tahun anggaran 2020, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan diwarnai hiruk-pikuk penyampaian aspirasi dari elemen masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*“Dan dinamika pembahasan yang kondusif serta tetap mengikuti proses dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku”, Tutar Ali Mazi*



I  
a  
b  
e  
r  
h  
a  
r  
a  
p  
a  
g  
a  
r  
d  
e  
n

gan usainya Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, dengan anggaran yang ada dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara khususnya dibidang kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.

*“Atas keseriusan dan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi saya berharap agar dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Ekonomi dan pendidikan masyarakat di Sulawesi Tenggara,” Urainya.*

Setelah Sambutan dari Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur menanda tangani Persetujuan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sultra Tahun Anggaran 2020.

**Pantauan awak media SultraNET. rapat yang berlangsung nyaman dihadiri DANLANAL Kendari, LANUD Haluoleo, KA BASARNAS, Para Pejabat Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Biro Lingkup Pemprov Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal baik TNI dan POLRI, Pimpinan BUMD Lingkup Pemprov Sultra, Pimpinan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Insan Pers baik cetak maupun Online.**

**Reporter : Awal Kurniawan**

---

# **G-30S-PK Gelar Aksi Tagih Janji**

# Kampanye Tafdil-Johan untuk Perbaiki Jalan Kabaena

Rumbia, SultraNET. | Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30S-PK) menggelar aksi di Bundaran Tugu Brimob Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019).

Dalam orasinya massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana khususnya dibidang infrastruktur jalan Pulau Kabaena.

Salah satu orator Muh Amsar mengatakan, Bahwa jalan merupakan syarat utama untuk peningkatan ekonomi rakyat, sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunannya di setiap wilayah yang ada Di Kabupaten Bombana.



Massa Aksi G-30S-PK saat Orasi di Depan Tugu Brimob Kasipute

*“Jalan di Kabaena seharusnya bisa lebih baik, karena menghasilkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan sedangkan jalan Kabaena kambing saja tidak bisa lewat,” tutur Amsar*

Lebih lanjut Muh Amsar menilai dengan hadirnya perusahaan tambang yang bergelimpangan di pulau kabaena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bombana

seharusnya lebih meningkat dan dapat menopang meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabaena tapi kenyataanya tidak.

*“Tapi faktanya, PAD menurun dari Rp800 miliar, menjadi Rp700 miliar,” urainya.*

Amsar menjelaskan Kehadiran mahasiswa dan pemuda kabaena menuntut janji Bupati saat kampanye Pilkada lalu, dimana janji Tafdil-Johan saat itu bakal memperbaiki jalan lingkar Kabaena hingga layak dilalui dan menjadikan pembangunan jalan di Pulau Kabaena sebagai program Bupati Bombana, H.Tadlil dan Wakil Bupati, Johan Salim .

*“Kita tidak meminta bagi-bagi kue soal pembangunan jalan. Kita hanya meminta janji Tafdil dan Johan Salim yang akan membangun aspal (jalan) lingkar di Pulau Bombana,” tegasnya.*



Massa Aksi G-30S-PK saat orasi di Kantor DPRD Bombana

Aksi unjuk rasa G-30S PK Yang di mulai sejak pukul 10 wib dengan titik kumpul tugu brimob dilanjutkan ke Kantor DPRD Bombana,selanjutnya ke Kantor Bupati dan berakhir di kantor BAPPEDA.

**Pantauan awak media ini, nampak massa Aksi dikawal ketat pihak keamanan dari Kepolisian Resort Bombana dan berlangsung tertib. (Efendy)**

---

# HMI Cabang Kendari Desak Kemenkumham Usut Tuntas Pelanggar HAM Penyebab Tewasnya Randi dan M Yusuf

**Kendari, SultraNET.** | Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019)

Dalam orasinya Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi mendesak lembaga itu segera mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi 26 September 2019 lalu yang menyebabkan dua orang mahasiswa Randi dan M. Yusuf gugur akibat terkena peluru tajam.

*“HMI Kendari mendesak KEMENKUMHAM segera membentuk Satgas pengusutan Kasus Penembakan dan Pemukulan serta tindak refresif pihak Kepolisian Sultra terhadap massa aksi 29 September 2019,” Tutur Ujang.*

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, S.Sos.,S.H.,M.H saat menerima massa aksi mengklaim bahwa pihaknya telah membentuk tim pengusutan kasus tersebut.

*“Dan kami siap mengawal bersama sama kawan-kawan HMI dan Membentuk tim investigasi, Pengumpulan bukti dan data data dan kami akan segera sampaikan kepusat,” Imbuhnya.*

Setelah berhasil menemui Kakanwil KEMENKUMHAM, Massa Aksi dari HMI Cabang Kendari menggelar Konfrensi Pers di Sekretariat HMI Cabang Kendari dengan Pembicara Ujang selaku Ketua Umum HMI Cabang Kendari dan Enggi

Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi pada aksi 30 September 2019 yang berlangsung dikantor KEMENKUMHAM Kendari.

**Dalam Konferensi Pers tersebut, HMI Cabang Kendari menyampaikan bakal melakukan aksi lanjutan dipolda SULTRA, sembari menunggu kedatangan Kapolda SULTRA baru dan menunggu intruksi dari Ketua Umum HMI Cabang Kendari.**

**Reporter : Awal kurniawan**

---

# **Nasdem Wakatobi Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Tanpa Mahar**

**Wakatobi, SultraNET. | DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Wakatobi tanpa dipungut biaya apapun alias tanpa mahar, Sabtu (29/09/2019).**

Ketua DPD partai Nasdem Wakatobi, Adbul Rahim mengatakan pembukaan pendaftaran ini berdasarkan peraturan organisasi mengenai tata cara penjangingan, verifikasi dan penetapan bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah 2020.

*“Nasdem masih pada komitmen awal bahwa pendaftaran dilakukan tanpa mahar mulai awal pendaftaran hingga proses pengembalian berkas,” tutur Abdul Rahim saat jumpa pers di sekretariat DPD Partai Nasdem jalan Ahmad Yani nomor 64, Wangi-wangi selatan.*

Tagline tanpa mahar menurutnya merupakan edukasi politik yang diberikan oleh partai Nasdem kepada masyarakat bahwa partai adalah salah satu wadah untuk kemudian menyaring pemimpin ke depan tanpa memiliki beban. dan dinilainya

cukup sukses diterapkan.

Kendati demikian, Rahim menyampaikan partai Nasdem telah menetapkan syarat-syarat tertentu baik syarat khusus maupun syarat umum. Untuk syarat umum ini kata Rahim, sifatnya masih normatif.

***“Dan disyarat khusus kita ada penekanan Pertama adalah popularitas, elektabilitas, kedisukaan, kemudian yang paling penting adalah kemampuan finansial untuk mobilisasi dan sebagainya dalam pertarungan,” paparnya.***

Terkait apakah partai Nasdem nantinya akan berkoalisi atau tidak pihaknya masih menunggu sampai tahapan proses seleksi selesai. Katanya, di DPD hanya melakukan fasilitasi dalam kaitannya dengan penjaringan kemudian selanjutnya akan diteruskan sampai ke DPW dan DPP.

***“saya melihat bahwa kemungkinan kita akan mengusung calon bupati. Sebab diinternal kami sendiri belum ada yang bisa kita usung jadi calon bupati. Oleh karena itu kita akan selektif mungkin,” bebernya. (adm)***

Laporan ; Samidin